

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Ratih Asterina Putri¹, R. Bambang DwiWiryanto²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}
ratihasterinaputri@gmail.com

ABSTRAK

Pengkajian disini digunakan agar mencari tau kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya kemudian dianalisis menggunakan rasio laporan keuangan pemerintah. Subjek dan objek yang digunakan peneliti yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya dan Laporan Realisasi APBD Kota Surabaya Tahun 2014-2018. Peneliti memakai jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan daerah yaitu, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Secara umum hasil rasio efektivitas dapat dikatakan efektif, rasio efisiensi hasilnya tidak efisien, rasio kemandirian pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pola hubungan Instruktif atau rendah sekali, rasio keserasian pemerintah Kota Surabaya lebih mementingkan belanja operasi dibandingkan belanja modal, dan rasio derajat desentralisasi fiskal hasilnya kurang.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio derajat desentralisasi fiskal.

ABSTRACT

This study is used to determine the financial performance of the Surabaya City Government then analyzed using the ratio of government financial statements. The subjects and objects used by researchers are the Surabaya City Government Financial Performance and Surabaya City Realization Report 2014-2018. Researchers used qualitative research and descriptive methods. This study uses the analysis of regional financial ratios namely, the ratio of effectiveness of PAD, the ratio of regional financial efficiency, the ratio of independence, the ratio of harmony and the ratio of the degree of fiscal decentralization. In general, the results of the effectiveness ratio can be said to be effective, the efficiency ratio of the results is inefficient, the independence ratio of the Surabaya City government shows an Instructive or very low relationship pattern, the harmony ratio of the Surabaya City government is more concerned with operating expenditure than capital expenditure, and the ratio of the degree of fiscal decentralization results is less.

Keywords: Financial Performance, PAD effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio, equal ratio, degree of fiscal decentralization ratio.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dengan adanya era baru pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah membuat perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah sangat besar karena suatu daerah bisa dikatakan kuat jika daerah tersebut dapat mengelola keuangannya dengan baik.

Di berlakukannya UU. No. 23 Tahun 2014, Setiap pemerintah daerah harus bisa mengolah dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di daerahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan dari pemerintah pusat ini bertujuan agar meningkatkan kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya supaya pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat.

sumber daya manusia yang berkopeten juga perlu tapi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Keahlian keuangan pemerintah daerah bisa dilihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur menaplikasikan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan penilaian kinerja keuangan tersebut berupa analisis rasio keuangan. (Puspitasari,2013:6).

Menurut Mahmudi (2016:135) dalam mengukur kinerja, harus melakukan perhitungan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, dengan menghitung rasio keuangan yang meliputi: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah, yaitu Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika diamati memakai rasio keuangan pemerintah daerah?

TELAAH PUSTAKA

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menuturkan “kinerja ialah hitungan hasil dari tindakan yang akan dicapai atau telah tercapai atas penerapan anggaran dengan terukurnya kapasitas.”

Menurut Machmud dkk (2014:5) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah peingkat pencapaian atas sebuah perancangan selanjutnya dimasukkan kedalam APBD, seperti mencakup anggaran dan realisasinya. Jika anggaran yang diiagendakan sesuai pencapaian maka dikatakan sangat baik kinerjanya. Namun sebaliknya misalkan tidak mencapai yang diharapkan maka dapat dikatakan buruk kinerjanya.

Menurut Mahsun (2013: 25), "Pengukuran kinerja adalah sebuah sistem penaksiran perkembangan pekerjaan atas sasaran dan tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan, meliputi keterangan atas penggunaan sumber daya efisiensi yang bisa menciptakan barang dan jasa, keunggulan barang dan jasa, selanjutnya hasilnya dipadankan agar dapat hasil memuaskan dalam langkah menggapai tujuan."

Menurut Mahmudi (2016:135) cara menilai kinerja, dengan menjalankan pengaplikasian dengan menjumlah rasio keuangan yang meliputi:

1. Rasio Efektivitas PAD

Mempelihatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengerahan pendapatan PAD setara dengan sasaran (Mahmudi 2016:143). Bila Rasio Efektivitas PAD tinggi, maka akan sangat baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan ini adalah rumusnya

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Memaparkan antara perbandingan banyaknya dana yang disediakan untuk memungut pendapatan dengan penerimaan realisasinya. Kinerja, menurut Mahmudi (2016:140). Berikut ini adalah rumus dari Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menyatakan fase keahlian daerah untuk mengeluarkan biaya aktivitas pemerintah sendiri, pengembangan dan pelayanan pembayaran pajak terhadap masyarakat dan retribusi yang digunakan semacam sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah, menurut Mahmudi (2016:140). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{KKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Mendeskripskan seperti apa pemerintah daerah mementingkan bagian dananya kepada Belanja Operasi dan Belanja Modal sebanyak-banyaknya. Rasio Keserasian mempunyai 2 perhitungan.

Rasio Belanja Operasi

besarnya total Belanja

banyaknya Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

menjelaskan

Operasi dengan

Daerah. (Mahmudi

2016:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut: